

**PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NO.157/PDT.G/2018/PA.WTP
DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 3 AYAT 1
PP NO.45 TAHUN 1990)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum(SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Oleh

ANDI FITRI WAHYUNI
NIM. 01171201

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad Saw, sebagai *uswatun hasanah* dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi. Selanjutnya semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kepada orang tua penulis yaitu A. Jamaluddin dan A. Ratna Wati yang tercinta dan tersayang yang mendidik penuh dengan tanggung jawab, mendukung dan mendoakan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta telah memberikan motivasi, doa, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum., Rektor IAIN Bone Wakil Rektir I, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd, Wakil Rektor II Bapak Dr.Abdulahana, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III Bapak Dr. H. Fathurrahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H

4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dra. Hasma, M.HI, yang senantiasa memberikan petunjuk demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Husaini, M.SI, pembimbing I dan Bapak Imron Rizki A.SH., M.H. pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si dan seluruh staff perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama penulis untuk mengurus demi mencapai gelar sarjana (SI) dan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan skripsi ini ada manfaatnya kepada kita semua. *Aamiin*

Watampone , 24 April 2021

ANDI FITRI WAHYUNI

NIM 01.17.1201

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Aparatur Sipil Negara	20
B. PP No 10 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 tentang Perceraian yang Mengatur Aparatur Sipil Negara	27
C. Kompetensi Hakim	30
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan (Studi Kasus No.157/Pdt.G/2018/PA.Wtp)	49
C. Analisis Yuridis Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terhadap Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan (Studi Kasus No157/Pdt. G/2018/PA.Wtp)	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

NAMA : ANDI FITRI WAHYUNI
NIM : 01171201
JUDUL SKRIPSI : Perceraian Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Hakim No 157/Pdt.G/2018/PA.Wtp dalam kaitannya dengan pasal 3 ayat 1 PP No 45 Tahun 1990).

Skripsi ini membahas tentang Perceraian Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Hakim No 157/Pdt.G/2018/PA.Wtp dalam kaitannya dengan pasal 3 ayat 1 PP No 45 Tahun 1990). Masalah ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana analisis yuridis Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 terhadap perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan pengumpulan data tersebut dapat di ambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.157/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengenai Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan, penggugat membuat surat pernyataan di atas materai atas peringatan dari hakim penggugat telah menyatakan siap menanggung segala resiko yang di berikan oleh atasannya dan Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 bahwa Peraturan yang termuat didalam PP No 45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang hanya mengikat PNS Yang ber perkara saja dan tidak mengikat Hakim, dan bagi Mahkamah Agung, hendaknya mensosialisasikan SEMA No.5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.